



Institut Informatika & Bisnis

DARMAJAYA

Yayasan Affan Husin

DARMAJAYA
The **Best**

 **INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS**
DARMAJAYA



GBE

KEBIJAKAN MONETER PERTEMUAN KE 2

Dr. Ita Fionita, S.E.,M.M

Kode MK : GBE
MK : MMA 1930631

OUTLINE



Kebijakan Moneter

- Kebijakan moneter : 1.Rule Policy. 2. Discretion Policy.
- Model Kebijakan menurut Ahli
- Tujuan Kebijakan Moneter
- Instrumen Kebijakan Moneter
- Jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter

seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur masalah makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran.

Kebijakan moneter

Cara pelaksanaan melalui, penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar.

Bank sentral atau badan negara pengatur yang bertanggung jawab atas hal ini yang berhak merumuskan kebijakan ini. Untuk di Indonesia sendiri kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank sentral yaitu **Bank Indonesia**

Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang menekankan pada sisi perubahan Jumlah Uang Beredar (JUB).

Suatu negara yang sedang melaksanakan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, membutuhkan kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Salah satu kebijakan yang dapat digunakan adalah kebijakan moneter.

Rule Policy

Kebijakan yang ditetapkan pada suatu kondisi tertentu untuk diberlakukan secara terus-menerus (dan tidak mengalami perubahan),



Rule Policy

kebijakan yang berada di bawah teori moneter yang dikemukakan oleh Friedman. Dalam teori Kuantitas dikemukakan bahwa fluktuasi GNP disebabkan oleh adanya fluktuasi Supply Uang (JUB).

Discretion Policy.

kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu, atau kebijakan yang senantiasa berubah tiap periodenya, disebut **Discretion Policy**.

Mengatasi fluktuasi GNP ini maka diperlukan suatu tingkat pertumbuhan JUB yang stabil/tetap. Pengendalian JUB secara teratur dengan cara JUB tumbuh dengan suatu tingkat tertentu yang konstan ini berlaku dalam jangka panjang. **Dengan Fixed Growth Rate in The Money Supply**, maka kontraksi dan ekspansi ekonomi akan menjadi relatif stabil.

Discretion (Countercyclical)

Kebijakan yang dicetuskan oleh penasihat presiden Kennedy dan Johnson. Discretion ini menganut perubahan JUB yang sesuai dengan kebutuhan, karena JUB tergantung pada nilai variabel ekonomi yang lalu dan yang akan datang

Alasan fundamental dari *discretion* adalah gangguan perekonomian (GNP) yang utama itu berasal dari sektor riil. Karena '*range of swings*' dari output riil ini tidak menentu, maka tidak ada 'rule' yang absolute yang dapat mengatasi sepanjang periode yang lama. Untuk itu kebijakan discretionlah yang paling tepat. Hal lain yang mendasari discretion adalah kondisi sistem ekonomi yang sangat kompleks, sedangkan pengetahuan terbatas, sehingga terdapat konsekuensi terjadinya malfungsi dari Kebijakan Rule.

model dari Robert J. Barro (1983), lebih banyak menyoroti bagaimana perilaku pembuatan kebijakan tersebut mempertimbangkan reaksi dan ekspektasi dari masyarakat.

Bennett T. McCallum (1989), yang diharapkan dapat memperjelas perbedaan antara dua bentuk kebijakan moneter tersebut.

Model Pengangguran Inflasi Barro dan Gordon (1983)

memformulasikan model untuk melihat perilaku pemerintah dalam membuat kebijakan moneter melalui pendekatan pengangguran-inflasi.

Di dalam model terdapat tiga hal yang utama yaitu:

1. Tingkat Pengangguran merupakan proxi bagi aktivitas ekonomi riil.
2. Pembuat kebijakan (yang selanjutnya dalam makalah ini disebut sebagai pemerintah) dan masyarakat bertindak rasional.
3. Tujuan pemerintah mencerminkan preferensi masyarakat.

Model Pertumbuhan Uang

Model pengangguran-inflasi lebih menekankan pada mekanisme terjadinya/terbentuknya kebijakan rule atau discretion. Untuk lebih memperjelas perbedaan kedua kebijakan tersebut, maka model Pertumbuhan Uang dari *McCatlum (1989)* berikut merupakan bentuk yang lebih sederhana untuk mengamati perbedaan efektivitas antara rule dan discretion.

Rules Versus Discretion

Dua model di atas, kita dapat melihat perbandingan kelemahan/keunggulan antara rule dan discretion. Perbandingan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bila pemerintah menggunakan rule, maka fungsi reaksi masyarakat yang dipertimbangkan hanya satu saja yaitu $h(I_{t-1})$. Kondisi ini membuat rule tampak seperti kendala yang tak berujung bagi pemerintah. Dari hal ini, maka rule akan layak hanya jika pemerintah tidak cakap dan tidak terpercaya yaitu dalam bentuk penetapan tujuan yang tidak tepat.

2. Hal penting dari rule adalah kapasitasnya untuk membatasi kebijakan yang akan dibuat pada periode yang akan datang. Dalam kasus pengangguran inflasi, hasil dari rule akan bersifat suboptimal, bila kita mengabaikan biaya pemberlakuan kebijakan. Solusi $\pi_t = 0$ dan $U_{t+1} = U_t$, dapat dicapai melalui mekanisme (dengan biaya yang rendah) yang membatasi tindakan pemerintah yang akan datang terhadap inflasi.

3. **Pencrapan rule** yang memperhatikan perilaku pemerintah secara jangka panjang merupakan faktor penting bagi inflasi, karena akan memberi jaminan tingkat inflasi yang rendah dan relatif stabil.

4. Bila pemerintah menerapkan discretion, pemerintah memandang trade off pengangguran-inflasi pada setiap periode. Pemerintah kemungkinan berada dalam situasi di mana kesepakatan jangka panjang dengan masyarakat dihindari. **Discretion** tidak menyediakan suatu kebijakan jangka panjang atau tidak mampu untuk melakukan tindakan yang akan datang.

5. Secara global, rule akan menghasilkan dampak inflasi yang lebih rendah dibandingkan bila diterapkan **kebijakan discretion**.

Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah manajemen inflasi atau pengangguran, dan pemeliharaan nilai tukar mata uang. berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya:

1. Inflasi

Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini.

2. Pengangguran

Kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Sebagai contoh, kebijakan ekspansif umumnya mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja.

3. Nilai tukar mata uang

Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain.

Instrumen Kebijakan Moneter

Bank-bank sentral menggunakan berbagai instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Instrumen yang banyak digunakan meliputi:

1. Penyesuaian tingkat suku bunga

Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto (tarif dasar) adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat, dan jumlah uang beredar akan berkurang.

2. Penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM)

Bank sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Giro Wajib Minimum (GWM) sendiri adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank.

Dengan mengubah jumlah yang diperlukan, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar di pasar. Jika bank sentral meningkatkan giro wajib minimum, bank komersial hanya akan menyediakan sedikit uang tunai untuk diberikan kepada pelanggan dan dengan demikian, suplai uang menurun.

3. Operasi pasar terbuka

Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah. Akibatnya, bank akan memperoleh lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang beredar dalam pasar.

Tahun 1998 Indonesia menghadapi kondisi sistem keuangan yang sulit. Terjadi banyak kerusuhan dan krisis moneter. Kamu mungkin dulu juga menjadi bagian yang merasakannya. Saat krisis moneter, nilai tukar rupiah jatuh dan menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar. Berangkat dari peristiwa tersebut, mestinya Indonesia bisa belajar dan memperbaikinya, salah satunya dengan kebijakan moneter.

Jenis Kebijakan Moneter

Berdasarkan tujuannya, ada 2 kebijakan moneter yang biasa dipakai banyak negara, yaitu kebijakan ekspansi dan kebijakan kontraktif. Berikut adalah penjelasan dari 2 jenis kebijakan tersebut :

Kebijakan Ekspansif

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank.

Bersamaan dengan itu, kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis dan kegiatan belanja konsumen. Tujuan keseluruhan dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun resikonya, kebijakan ini dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi.

Kebijakan Kontraktif

Tujuan dari kebijakan moneter kontraktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan kontraksi digunakan ketika pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi.

Kesimpulan

Kebijakan *rule dan discretion* masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Penetapan kebijakan haruslah didasarkan pada fungsi reaksi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar **kebijakan dapat diterapkan secara optimal**.

Kebijakan *rule* memerlukan suatu disain yang tepat, karena kebijakan ini akan digunakan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Hasil kebijakan ini memang tidak dapat optimal, karena hanya berdasarkan suatu kondisi/periode tertentu saja, tetapi dapat menekan tingkat inflasi demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia menggunakan kebijakan moneter yang bersifat *discretion*. Dampak dari penerapan kebijakan tersebut berupa inflasi yang berfluktuasi, walaupun pada lima tahun terakhir tampak lebih stabil.

- Daftar Pustaka Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, berbagai terbitan
- Barro, J.R and David B.G (1983), "A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model", Journal of Political Economy, Vol. 91, No. 41, hal. 589-609.
- International Monetary Fund, IPS, berbagai terbitan.
- Lockett, G.D (1984), Money and Banking, McGraw-Hill Book Company, 3rd ed. McCallum, T.B (1989), "Rules Versus Discretion in Monetary Policy", dalam T.B.
- McCallum (ed), Monetary Economics, Theory and Policy, Ch. 12, hal. 237-248, Macmillan Publishing Company, New York.
- <file:///C:/Users/acer/Downloads/40013-106124-1-SM.pdf>
- <https://jojonomic.com/blog/pengertian-kebijakan-moneter/>
- <https://cpssoft.com/blog/keuangan/penjelasan-lengkap-kebijakan-moneter/>

Sekian &
Terima Kasih

